

**PENGARUH PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENCAIRAN  
TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**OLEH:**

**NAMA : INDRIANI SIAGIAN**  
**NPM : 1505170616**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



UMSU  
Unggul Cerdas Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

Nama  
NPM  
Program Studi  
Judul Skripsi  
Dibayarkan

**FITRIANI SARAGIH**  
1205170636

**MANJANISI**

**PENGARUH PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN BRATAMA BINJAI.**

(B) telah Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

MEMUTUSIKAN

Tim Penguji

Penguji H

Penguji I

**FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si**

**EDI SAH PUTRA NAINGGOLAN, SE., M.Ak**

Penghubung

**JUMIRIN, SE., M.Si**

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

**H. JANURI, S.E., MM., M.Si.**

**ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

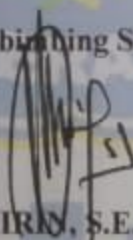
Skripsi ini disusun oleh:

Nama : INDRIANI SIAGIAN  
N P M : 1505170616  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK  
TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

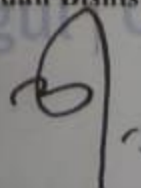
Pembimbing Skripsi



(JUMIRIN, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

## ABSTRAK

**INDRIANI SIAGIAN NPM 1505170616. Pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Peayanan Pajak Pratama Kota Binjai. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak baik secara parsial maupun simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Binjai.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Binjai sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan berjumlah 99 orang dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *software* SPSS (*Statistic Package for the Social Sciens*) versi 24.00.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Secara parsial ada pengaruh signifikan penagihan tunggakan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai dengan dipeeroleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,709 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,008 \leq 0,05$ . secara parsial ada pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai dengan dipeeroleh  $t_{hitung}$  sebesar 7,833 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,008 \leq 0,05$ . Secara simultan ada pengaruh signifikan penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai dengan  $F_{hitung}$  sebesar 177,746 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 3,09 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$ .

**Kata Kunci : Penagihan Tunggakan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pencairan Tunggakan Pajak**

## KATA PENGANTAR



*Assalammualaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamina puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Pengaruh Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Terima kasih untuk yang istimewa Ayahanda Indra Hasanuddin Siagian dan Ibunda Juniati Sitorus tercinta yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan Proposal ini. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum S.E.,M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi.
8. Bapak Jumirin S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Ibu Dr Eka Nurmala Sari S.E M.,Si Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti selama berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan Proposal ini.
11. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas E Akuntansi Pagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2015.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

*Wassalammualaikum, Wr.Wb*

Medan, Februari 2019

Penulis

**Indriani Siagian**  
**NPM:150517061**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Pajak .....	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Ciri-ciri Pajak.....	11
c. Fungsi Pemungutan Pajak.....	12
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2. Wajib Pajak.....	14
a. Pengertian Wajib Pajak.....	14
b. Kewajiban Wajib Pajak.....	16
c. Hak Wajib Pajak.....	17
3. Penerimaan Pajak.....	18
a. Pengertian Penerimaan Pajak.....	18
b. Pengertian Pajak Penghasilan.....	19
c. Subjek Pajak Penghasilan.....	20
d. Objek Pajak Penghasilan.....	23
e. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
4. Utang Pajak.....	24
a. Timbulnya Utang Pajak.....	24
b. Berakhirnya Utang Pajak.....	25
5. Penagihan Pajak.....	26
a. Pengertian Panagihan Pajak.....	26
b. Dasar-dasar Penagihan Pajak.....	27
c. Tindakan Penagihan Pajak.....	29
d. Prosedur Penagihan Pajak.....	30
6. Pemeriksaan Pajak.....	31



a. Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	31
b. Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak.....	32
c. Sasaran Pemeriksaan Pajak.....	33
d. Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	33
e. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak.....	34
f. Tahapan Pemeriksaan Pajak.....	36
g. Standart Pemeriksaan Pajak.....	37
h. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.....	37
i. Metode Dalam Pemeriksaan Pajak.....	39
7. Penelitian Terdahulu.....	40
B. Kerangka Konseptual.....	41
C. Hipotesis.....	42

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Defenisi Operasional Variabel.....	44
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
D. Populasi dan Sampel.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	57
B. Pembahasan.....	71

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Pajak Pada KPP Kota Binjai Tahun 2015-2017 .....	
5	
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	
40	
Tabel III.1 Waktu Penelitian .....	
46	
Tabel III.2 Skala Likert .....	
48	
Tabel III.3 Hasil Uji Validitas Variabel Penagihan Tunggakan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Pencairan Pajak.....	50
Tabel III.4 Hasil Uji Reabilitas.....	51
Tabel IV.1 Jenis Kelamin.....	
57	
Tabel IV.2 Usia.....	
58	
Tabel IV.3 Kriteria Jawaban Responden.....	
58	
Tabel IV.4 Persentase Jawaban Responden Variabel Pencairan Tunggakan Pajak (Y).....	
59	
Tabel IV.5 Persentase Jawaban Responden Variabel Penagihan Tunggakan Pajak (X1).....	
60	

Tabel IV.6 Persentase Jawaban Responden Variabel Pemeriksaan Pajak.....	61
Tabel IV.7 Hasil Uji Multikolinieritas.....	63
Tabel IV.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	65
Tabel IV.9 Hasil Uji Statistik t (parsial).....	67
Tabel IV.10 Hasil Uji Simultas (Uji-F).....	69
Tabel IV.11 Hasil Uji Determinasi.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	41
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas.....	62
Gambar IV.2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana. Dana ini salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat dan pendapatan yang diperolehnya, oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Disamping itu pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai

Menurut (Andriani dalam Bohari 2012:23) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Menurut Suandy (2011:12) “bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi finansial (budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend)”. Pajak berfungsi budgeter yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan pajak berfungsi regulerend yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada wajib pajak yakni, salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana wajib pajak dapat diberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, maka agar self asesment system ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakkan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terhutangnyanya. Sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak ini timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah dan harus dilunasi(Eddy Faisal, 2016, hal. 69).

Melihat definisi di atas maka penagihan pajak merupakan salah satu rangkaian atau tindakan dalam sistem perpajakan nasional, yaitu sebagai law enforcement terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban

perpajakannya sebagaimana mestinya. Tindakan penagihan dilakukan, baik secara persuasif maupun secara represif. Artinya tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi bila Wajib Pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa.

Dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Ketetapan Pajak. Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat Lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya

KUP No. 16 Tahun 2009 dalam pasal 3 ayat (5a) menyatakan bahwa: “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran”. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam UU tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.” Sementara ayat (2) menyatakan “Surat

Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.”

Jumlah tunggakan utang pajak dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang semakin besar. Namun, peningkatan jumlah tunggakan utang pajak ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Hal ini mengakibatkan besarnya piutang pajak dan juga akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Binjai.

Dalam meningkatkan penerimaan memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada tingkat pencairan pajak semata, akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Salah satu faktor untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak sebagai salah satu pilar law enforcement memiliki peran yang dapat meningkatkan penerimaan pajak (Bambang Irawan dan Teguh Budiono, 2015) “ pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut Erly Suandy (2002 hal: 57)

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan maka dapat diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana

telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan”.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (law enforcement) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan Wajib Pajak yang tidak benar dalam melaporkan pajaknya. Sebab itulah kenapa penting dilakukan pemeriksaan demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

KPP Pratama Kota Binjai mengharapkan bahwa tunggakan pajak dapat dilunasi secara keseluruhan. Total tunggakan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan , ini mengakibatkan berkurangnya pencairan pajak dan merugikan Negara yang sedang melakukan Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu, KPP Pratama Kota Binjai melakukan tindakan penagihan pajak, dengan maksud wajib pajak tersebut dapat melunaskan tunggakan pajaknya.

Berikut ini data tunggakan pajak pada Kantor Pajak Pratama Kota Binjai

**Tabel I.1**  
**Data Pajak Pada KPP Kota Binjai**  
**Tahun 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Tunggakan</b>	<b>WP Tunggakan</b>	<b>Pencairan</b>	<b>WP Pencairan</b>
2015	66.629.796.394	14.826		
2016	102.897.399.369	16.041	11.639.435.744	486
2017	75.005.354.499	16.324	13.658.084.105	727
2018	79.988.093.831	17.512	7.183.739.060	1.026

Sumber : KPP Kota Binjai



Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah tunggakan pajak pada KPP Kota Binjai pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan di ikuti oleh peningkatan jumlah wajib pajak tunggakan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi di ikuti oleh peningkatan jumlah wajib pajak tunggakan dan pada tahun 2018 jumlah tunggakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan diikuti oleh peningkatan jumlah wajib pajak tunggakan.

Jumlah pencairan tunggakan pada tahun 2015 mengalami kekosongan akan tetapi pada tahun 2016 terjadi pencairan. Pada tahun 2017 jumlah pencairan tunggakan mengalami peningkatan dan diikuti oleh peningkatan jumlah wp pencairan tunggakan dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan diikuti oleh peningkatan jumlah wp pencairan tunggakan.

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun pada kenyataannya usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan harapan. Masih banyak Wajib Pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut. Ini terbukti dengan adanya tunggakan pajak yang terjadi setiap tahun.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Penagihan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, penulis menemukan adanya permasalahan yaitu :

1. Pada tahun 2017 terjadinya penurunan jumlah tunggakan akan tetapi jumlah wp tunggakan mengalami peningkatan pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai
2. Jumlah pencairan atas tunggakan pada tahun 2015 mengalami kekosongan pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai.
3. Pada tahun 2018 terjadinya penurunan jumlah pencairan atas tunggakan dan diikuti oleh peningkatan jumlah wp pencairan atas tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka penulis hanya terfokus pada Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Tunggakan Pajak pada kantor pelayan pajak pratama Binjai

### **2. Rumusan Masalah**

Sesuai permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut

- a. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai.
- b. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai.

- c. Apakah penagihan pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penagihan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Apabila penelitian ini disampaikan atau dibaca oleh yang bersangkutan, diharapkan dapat memberikan informasi baik secara teoritis maupun praktisi sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian di harapkan mampu meningkatkan dan memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang perpajakan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan dalam memungut pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan melakukan pendataan secara berkala terhadap kepatuhan karyawan dalam melaporkan pajak terutang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi suatu pedoman dan menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Waluyo (2008:2): "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Mardiasmo (2009:1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan

kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

### **b. Ciri-Ciri Pajak**

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Mohammad Zain (2008:12) sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
- 3) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:1), ciri-ciri pajak sebagai berikut:

- 1) Iuran rakyat kepada Negara
- 2) Berdasarkan Undang-Undang
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditujukan
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari penjelasan diatas , dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yaitu :

- 1) Pajak dikelola dan di pungut oleh pemerintah langsung baik itu dari daerah ataupun pusat
- 2) Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku
- 3) Pajak akan di pungut sesuai dengan biayanya yang nantinya jumlah keseluruhan pajak yang telah masuk tersebut akan digunakan sebagai pengeluaran pemerintah.
- 4) Pajak tidak menimbulkan adanya kontraprestasi dalam pemerintah secara langsung.
- 5) Pajak memiliki fungsi sebagai pengatur anggaran pemerintahan.
- 6) Pajak ini tidak akan memiliki hasil yang instan.

### **c. Fungsi Pemungutan Pajak**

Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai definisi di atas, terlihat ada dua fungsi pemungutan pajak menurut Resmi (2011:3) yaitu:

#### 1) Fungsi Budgetair

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

#### 2) Fungsi Regulerend

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

- 1) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada



Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- 3) *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2. Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Wajib Pajak**

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.

- 3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- 4) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
- 5) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.
- 6) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.
- 7) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
- 8) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hal dan kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan menurut UU PPh merupakan Wajib Pajak sebagai pemotong/pemungut Pajak Penghasilan.

#### **b. Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut Prantara dalam buku Perpajakan Indonesia edisi 3 (2016, hal 50). Sistem pemungutan pajak Self Assesment memberikan kepercayaan, tanggung

jawab kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya kepada negara.

Menurut Undang-Undang mengenai kewajiban kepada Wajib Pajak sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan memperoleh NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Mengisi dengan benar dan menyampaikan SPT Masa dan Tahunan tepat waktu ke kantor DJP.
- 3) Mengisi dengan benar Faktur pajak pada transaksi penyerahan kena PPN.
- 4) Memotong atau memungut PPh atas penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut PPh.
- 5) Menyetor pajak terutang ke Kas Negara baik yang dihitung sendiri atau dipotong dan dipungut oleh Wajib Pajak atau ditetapkan dan ditagih oleh DJP melalui bank dengan SSP dengan benar dan tepat waktu.
- 6) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dengan tertib, teratur dan jujur sesuai ketentuan.
- 7) Memenuhi kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

### **c. Hak Wajib Pajak**

Menurut Prantara (2016, hal 50-51). Dalam pelaksanaan sistem Self Assesment, di samping dikenakan kewajiban perpajakan, Undang-Undang memberikan hak kepada Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) Meminta penjelasan atas hasil pemeriksaan pajak
- 2) Meminta pemeriksaan pajak agar melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan pajak
- 3) Meminta penjelasan quality assurance atas hasil pemeriksaan pajak
- 4) Menolak hasil pemeriksaan
- 5) Mengajukan keberadaan atas SKP atau pemotongan dan pemungutan pajak termasuk hak untuk diundang dan hadir pada pembahasan keberatan
- 6) Mengajukan banding
- 7) Mengajukan gugatan
- 8) Mengajukan PK
- 9) Mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak
- 10) Mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, penghapusan atau pengurangan atas ketetapan pajak atau sanksi administrasi
- 11) Mendapatkan imbalan bunga dalam hal DJP tidak mampu memenuhi batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perpajakan
- 12) Membetulkan SPT
- 13) Memanfaatkan tarif PPh 20% untuk Wajib Pajak Perusahaan Terbuka yang memenuhi syarat atas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Pasal 17 ayat (1) yang dikenakan atas penghasilan Kena Pajak dari

bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 untuk Wajib Pajak Dalam Negeri Badan yang peredaran bruto maksimal Rp. 50.000.000.000

- 14) Mencegah tindakan penyidikan dengan mendahului melakukan pembetulan atas SPT
- 15) Meminta dihentikan tindakan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana penjara
- 16) Mendapatkan jaminan rahasia
- 17) Penundaan pembayaran pajak
- 18) Pengangsuran pembayaran pajak
- 19) Penundaan (perpanjangan waktu) pelaporan SPT Tahunan.
- 20) Pengurangan PPh Pasal 25
- 21) Pengurangan PBB
- 22) Pengurangan BPHTB
- 23) Pembebasan Pajak
- 24) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- 25) Insentif Perpajakan

### **3. Penerimaan Pajak**

#### **a. Pengertian Penerimaan Pajak**

Ada beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Menurut John Hutagaol (2007:325) dalam Lina Rahmawatin (2011), penerimaan pajak adalah: "sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-

menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, "Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

#### **b. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah "suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya".

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana telah diuraikan diatas. Berbagai definisi Pajak Penghasilan (PPh) yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) agar mudah dipahami. Di bawah ini merupakan definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut ahli perpajakan.

Menurut Resmi (2011:74), "Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139), pengertian Pajak Penghasilan adalah: "...pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun". Menurut Suandy (2011:36), "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian Pajak Penghasilan (PPH) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

### **c. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak Penghasilan menurut Resmi (2011:75) adalah Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut Resmi (2011:76), kedua subjek pajak tersebut yaitu:

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
  - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

(1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari



Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip oleh Resmi (2011:78), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka, dengan syarat:
  - a) Bukan warga Negara Indonesia
  - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut.
  - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
  - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - b) Tidak menjalankan usaha, atau
  - c) Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
  - a) Bukan warga negara Indonesia.
  - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **d. Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau dikenakan pajak. Menurut Resmi (2011:79): "Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun". Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Resmi (2011:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
- 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya

#### **e. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi selama tahun pajak berjalan. Ada beberapa definisi Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikemukakan para ahli, diantaranya :

Menurut Direktorat Jenderal Pajak No.57/PJ/2009 Bab I Pasal 1 No.2 :  
"Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi". Subjek pajak dalam negeri adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak.. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan. Besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.

#### **4. Utang Pajak**

##### **a. Timbulnya Utang Pajak**

Pengertian utang pajak menurut menurut Bastari, dkk (2015, hal. 9) adalah sebagai berikut: Utang pajak adalah utang pajak yang timbul karena adanya peraturan yang mendasarinya dan terjadi karena ada keadaan-keadaan tertentu dan dikenakan atas keadaan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan (hal yang timbul karena perbuatannya).

Menurut Chairil Anwar (2017, hal 75) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu:

##### **1) Ajaran Materil**

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena sesuatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assesment system.

## 2) Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus(pemerintah). Ajaran inikonsisten dengan penerapan official assesment system.

### **b. Berakhirnya Utang Pajak**

Menurut Chairil Anwar (2017, hal 76), utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukam di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi.

#### 2) Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan dengan masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

#### 3) Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak maupun fiskus, maka diberi batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

**4) Penghapusan Utang**

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

**5) Pembebasan**

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena tindakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

## **5. Penagihan Pajak**

### **a. Pengertian Penagihan Perpajakan**

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut.

Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Mardiasmo (2011:125) mendefinisikan penagihan pajak sebagai berikut.

Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Ungdung pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan.

#### **b. Dasar-dasar Penagihan Pajak**

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut.

##### **1) Surat Tagihan Pajak (STP)**

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

##### **2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

**3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

**4) Surat Keputusan Pembetulan**

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

**5) Surat Keputusan Keberatan**

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

**6) Putusan Banding**

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

### **c. Tindakan Penagihan Pajak**

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.

Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penmagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.

#### **1) Penagihan pasif**

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Panagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

#### **2) Penagihan aktif**

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum juga



dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

#### **d. Prosedur Penagihan Kredit**

Pudyatmoko (2008:183) menyatakan bahwa langkah untuk penagihan pajak secara aktif-represif itu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

- 1) Untuk pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Surat teguran sebagaimana tersebut diatas tidak diterbitkan dalam hal penanggung pajak telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya.
- 3) Dalam hal jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa.
- 4) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP).

- 5) Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan.
- 6) Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penmyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.
- 7) Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

## **6. Pemeriksaan Pajak**

### **a. Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan Pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 menyatakan bahwa : “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak**

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly Suandy (2011, hal.207) adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun dan mengolah informasi yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem Self Assessment. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
- 2) Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

- 4) Pemeriksaan yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksaan pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

**c. Sasaran Pemeriksaan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009, hal.51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya:

- 1) Interpretasi undang-undang yang tidak benar
- 2) Kesalahan hitung
- 3) Penggelapan secara khusus dari penghasilan
- 4) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**d. Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Muhammad Djafar Saidi (2010, hal. 292) tujuan pemeriksaan adalah:

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
  - a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau rugi.
  - b) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
  - c) Data dan/atau keterangan dalam surat pemberitahuan menyimpang dari kewajaran dan kelaziman.

- d) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka dua tidak dipenuhi..
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan dalam rangka:
- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
  - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - c) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
  - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto.
  - f) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
  - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
  - h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
  - i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

**e. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak**

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Wirawan Iiyas dan Pandu Wicaksono (2015, hal.34) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Adapun Pemeriksaan Rutin meliputi sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar.
  - b) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar.
  - c) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  - d) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar kompensasi.
  - e) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
  - f) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
  - g) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan, dan atau penilai kembali aktiva tetap.
- 2) Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidak patuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, adapun ketentuan terkait tentang pemeriksaan khusus sebagai berikut:
- a) Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan analisis risiko.
  - b) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan rutin dapat dilakukan pemeriksaan khusus.

- c) Pemeriksaan khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
- d) Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan alasan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

#### **f. Tahapan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia (2010:286) dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan. Ada 3 tahap pemeriksaan :

- 1) Tahap persiapan pemeriksaan  
Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksaan sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Tujuan dari persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga pemeriksaan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
- 2) Kegiatan persiapan pemeriksaan meliputi :
  - a) Mempelajari berkas WP/ berkas data.
  - b) Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak.
  - c) Mengidentifikasi Masalah. d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
  - d) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
  - e) Menyusun program pemeriksaan.

- f) Menentukan buku-buku atau dokumen yang akan dipinjam.
- g) Menyediakan sasaran pemeriksaan.

3) Tahap pelaksanaan pemeriksaan :

- a) Memeriksa ditempat Wajib Pajak.
- b) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
- c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen.
- e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- g) Melakukan siding penutup (*Closing Conference*).

**g. Standart Pemeriksaan Pajak**

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015, hal. 39) standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan pencapaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.

Standar pemeriksaan meliputi:

- 1) Standar Umum.
- 2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan.
- 3) Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

**h. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2007 telah menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, wewenang pemeriksa pajak adalah sebagai berikut :



- a) Memeriksa atau meminjam buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
  - b) Meminta keterangan lisan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
  - c) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat member petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut.
  - d) Apabila Wajib Pajak tidak mengijinkannya, maka pemeriksa berhak melakukan penyegelan terhadap hal-hal diatas.
  - e) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan tidak ada ditempat saat pemeriksaan dilakukan.
  - f) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- 2) Dalam melakukan pemeriksaan kantor, wewenang pemeriksa pajak adalah sebagai berikut :
- a) Memeriksa atau meminjam buku-buku dan catatancatatan Wajib Pajak.
  - b) Meminta keterangan lisan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.

- c) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga.
- d) Mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa

**i. Metode Dalam Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: hal.306) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan dengan dua metode, adalah sebagai berikut :

- 1) Metode Langsung Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
- 2) Metode Tidak Langsung Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :
  - a) Metode transaksi tunai.
  - b) Metode transaksi bank.
  - c) Metode sumber dan pengadaan dana.
  - d) Metode perbandingan kekayaan bersih.
  - e) Metode perhitungan persentase.
  - f) Metode satuan dan volume.
  - g) Pendekatan produksi.
  - h) Pendekatan laba kotor.
  - i) Pendekatan biaya hidup.\

## 7. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

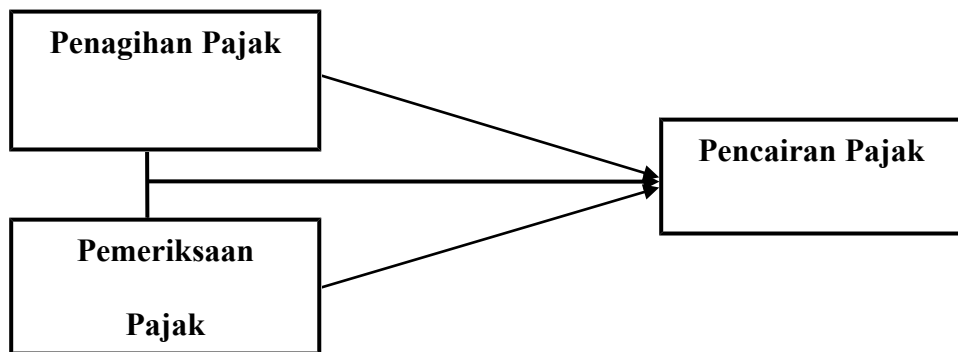
**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Pengaruh Penerimaan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Mohammad (2017) Skripsi	Pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.
2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Study Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)	Firdayani (2017) Jurnal	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dan Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
3	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015.	Sunarto (2018) Jurnal	Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak periode 2012-2015. Berdasarkan uji simultan ketiga variabel X secara bersama-sama berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak. 2. Secara parsial Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak periode 2012-2015. Karena berdasarkan uji parsial variabel penagihan pajak memiliki tingkat signifikan kurang dari <math>0.05\%</math>
4	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)	Wijayanto (2012) Jurnal	Hasil penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta.

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar II.3**  
**Kerangka Konseptual**

Tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai dapat ditagih melalui penagihan pasif dan penagihan aktif dengan target pencairan utang pajak yang telah ditetapkan. Penagihan pajak aktif merupakan lanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Dengan membandingkan realisasi penagihan aktif dengan target pencairan utang pajak maka akan diketahui efektivitas penagihan aktif

Wajib pajak melaporkan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak, SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tersebut diperiksa oleh AR (*Account Representative*)

untuk membuktikan kebenaran dari SPT yang telah dilaporkan, dengan terdapatnya masalah pada SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka KPP Pratama Binjai menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) kepada pihak pemeriksaan. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) terbit, maka dilakukannya pemeriksaan oleh pihak pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak berupa meminjam laporan keuangan, buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak dan keterangan lainnya untuk membuktikan kebenaran dari SPT tahunan yang dilaporkan.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang menunjukkan kurang/lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak, dan surat ketetapan pajak nihil. Sehingga penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai dapat meningkat. Dengan efektifnya penagihan dan pemeriksaan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu pemeriksaan pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

### **C. Hipotesis**

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara perilaku atau keadaan tertentu yang telah terjadi. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara oleh jawaban yang berasal dari teori Juliandi (2014, hal. 44).

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian ini, maka dapat diambil hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai.
3. Penagihan pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *assosiatif*. Menurut (Azuar Juliandi, dkk, 2015, hal. 86) mengatakan bahwa pendekatan *assosiatif* adalah penelitian yang ingin melihat apakah suatu variabel yang berperan sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap variabel lain yang menjadi variabel terikat.

Adapun topik utama yang menjadi variabel terikat adalah penerimaan tunggakan pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah penagihan pajak.

#### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional, menurut Sugiyono (2010, hal. 31) adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Menurut (Azuar Juliandi, dkk, 2015, hal. 86) mengatakan definisi oprasional bukanlah definisi/pengertian teoritis, tetapi oprasionalisasi dari variabel, berupa pengukuran atau pengujian suatu variabel. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah

##### **1. Penerimaan Tunggakan Pajak (Y)**

Penerimaan tunggakan pajak merupakan setoran ke kas negara yang berasal dari tunggakan pajak yang berhasil ditagih dengan serangkaian tindakan penagihan. Variabel penerimaan tunggakan pajak dilihat dari jumlah pembayaran tunggakan yang berhasil dicairkan dengan melakukan penagihan surat teguran dan surat paksa.

## **2. Penagihan Pajak**

Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

## **3. Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak adalah mempelajari berkas WP/berkas data dan menganalisis SPT serta Laporan Keuangan Wajib Pajak lalu mengidentifikasi masalah nya dan melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak kemudian baru menentukan ruang lingkup pemeriksaan maka pemeriksa pun akan mendapatkan gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pajak Pratama Binjai Jl. Jambi No. 1 Binjai Selatan Kota Binjai.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019. Adapun jadwal rencana penelitian mulai dari survey lokasi dan objek penelitian hingga penyelesaian penulisan skripsi adalah sebagai berikut

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**



No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																
2	Riset awal					■	■	■	■												
3	Pembuatan proposal									■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal													■	■	■	■				
5	Seminar Proposal																	■			
6	Penyusunan Sekripsi																		■		
7	Bimbingan Sekripsi																			■	
8	Sidang Meja Hijau																				■

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Sugiyono (2012, Hal. 80) menyatakan bahwa, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Jadi populasi juga bukan hanya orang, tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Adapun populasi didalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak tunggakan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama kota binjai pada tahun 2018 sebanyak 17.512 orang.

### 2. Sampel

Sugiyono (2016, hal.81) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dikarenakan keterbatasan waktu dan banyaknya wajib pajak yang menunggak pada kantor pelayanan pajak pratama kota Binjai, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya sebagian dari wajib pajak yang menunggak pada kantor pelayanan pajak pratama kota Binjai.

Penelitian jumlah sampel yang diambil sebagai responden dengan menggunakan rumus slovin dalam Sugiono (2016, hal. 83) sebagai

berikut :

Adapun persamaan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, misalnya 10% atau 0,01.

$$n = \frac{17.512}{1 + (17.512 \cdot 0,1^2)} = 99$$

Berdasarkan perhitungan Slovin di atas maka, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 orang wajib pajak yang menunggak pada kantor pelayanan pajak pratama kota Binjai pengambilan sample dengan cara teknik *accidental sampling* yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penulis yang bisa dijadikan sebagai pengambilan data. Sampel penelitian ini dibatasi hanya wajib pajak yang menunggak pada kantor pelayanan pajak pratama kota Binjai.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan dan wawancara.

1. Wawancara (interview) yaitu , melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang yaitu pada pegawai tetap
2. Quisioner (angket)  
Angket adalah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek baik secara kelompok, untuk mendapatkan informasi tertentu. Dimana angket tersebut penulis sebarakan

pada pegawai tetap dengan menggunakan skala likert dengan bentuk checklist, dimana setiap pertanyaan mempunyai opsi yaitu:

**Tabel III- 2 Skala Likert**

Keterangan	Skor
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang setuju (TS)	3
Tidak setuju (TS)	2
Sangat tidak setuju (STS)	1

Sumber : Juliandi dan Irfan (2013, hal. 71)

Selanjutnya angket yang disusun diuji kelayakannya melalui pengujian validitas dan reliabilitas.

### 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument adalah program komputer *Statistical Program For Sosial Science* (SPSS) versi 16,00 yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Dari beberapa daftar pertanyaan (*Questioner*) yang dijawab dan menghitung bahan pengujian Uji validitas menggunakan pendekatan “*single trial administration*” yakni pendekatan sekali atas jalan atas data instrumen yang disebar dan tidak menggunakan pendekatan ulang.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas butir. Menurut Sugiono (2016, hal 128), untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan atau tidak, maka harga *t hitung* tersebut perlu dibandingkan dengan harga *t tabel*. Bila *t hitung* lebih besar dengan *t tabel* maka perbedaan itu signifikan, sehingga instrument dinyatakan valid.

Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi *product moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

$$r = \frac{\sum XY - \frac{\sum X \sum Y}{N}}{\sqrt{(\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N})(\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N})}}$$

(Sugiyono, 2016, hal. 183)

Dimana:

N	=	Banyaknya pasangan pengamatan
$\sum X$	=	Jumlah pengamatan variabel X
$\sum Y$	=	Jumlah pengamatan variabel Y
$(\sum X^2)$	=	Jumlah kuadrat pengamatan variabel X
$(\sum Y^2)$	=	Jumlah kadrat pengamatan variabel Y
$(\sum X)^2$	=	Kuadrat jumlah pengamatan variabel X
$(\sum Y)^2$	=	Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y
$\sum XY$	=	Jumlah hasil kali variabel X dan Y

Ketentuan apakah suatu butir instrument valid atau tidak adalah melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya. Menurut Sugiono (2016, hal. 183), uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t table. Jika thitung lebih besar dari t table nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dengan cara lain yaitu dilihat dari nilai *sig (2 tailed)* dan membandingkan dengan taraf signifikan ( $\alpha$ ) yang ditentukan peneliti. Bila nilai *sig (2 tailed)*  $\leq 0.05$ , maka butir instrument valid, jika nilai *sig (2 tailed)*  $\geq 0,05$ , maka butir instrument tidak valid.

**Tabel III.3**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Penagihan Tunggakan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Pencairan Pajak**

Item Pernyataan	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan	
<b>Pencairan Tunggakan Pajak (Y)</b>	Y1	0.482	0.000 < 0,05	Valid
	Y2	0.472	0.000 < 0,05	Valid
	Y3	0.510	0.000 < 0,05	Valid
	Y4	0.560	0.000 < 0,05	Valid
	Y5	0.616	0.000 < 0,05	Valid
	Y6	0.547	0.000 < 0,05	Valid
<b>Penagihan Tunggakan Pajak</b>	X1	0.478	0.000 < 0,05	Valid

(X1)	X2	0.578	0.000 < 0,05	Valid
	X3	0.492	0.000 < 0,05	Valid
	X4	0.396	0.000 < 0,05	Valid
	X5	0.584	0.000 < 0,05	Valid
	X6	0.386	0.000 < 0,05	Valid
	X7	0.606	0.000 < 0,05	Valid
	X8	0.463	0.000 < 0,05	Valid
	X9	0.574	0.000 < 0,05	Valid
	X10	0.597	0.000 < 0,05	Valid
Pemeriksaan Pajak (X2)	X1	0.446	0.000 < 0,05	Valid
	X2	0.428	0.000 < 0,05	Valid
	X3	0.390	0.000 < 0,05	Valid
	X4	0.575	0.000 < 0,05	Valid
	X5	0.365	0.000 < 0,05	Valid
	X6	0.562	0.000 < 0,05	Valid
	X7	0.498	0.008 < 0,05	Valid
	X8	0.613	0.000 < 0,05	Valid
	X9	0.335	0.000 < 0,05	Valid
	X10	0.609	0.000 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS 24.00

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Selanjutnya untuk menguji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* dikatakan reliable bila hasil Alpha > 0,6 dengan rumus Alpha sebagai berikut

$$r_{11} = \frac{k}{(k-1)} \left[ 1 - \frac{\sum Si}{St} \right]$$

$r_{11}$  = Reliabilitas instrumen

$\sum Si$  = Jumlah varians skor tiap- tiap item

$St$  = Jumlah varians butir

$K$  = Jumlah item

Jika nilai reliabilitas mendekati 1, maka instrumen penelitian semakin baik. Nilai reliabilitas instrumen menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen penelitian sudah memadai karena sudah mendekati 1 (0,50).

**Tabel III.4**  
**Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	R Tabel	Keterangan
Pencairan Tunggakan Pajak (Y)	0.695	0,60	Reliabel
Penagihan Tunggakan Pajak (X1)	0.694		Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X2)	0.630		Reliabel

**Sumber : SPSS 24.00**

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas instrument menunjukkan tingkat reliabilitas instrument penelitian sudah memadai karena semua variabel di atas 0,60. Dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dari setiap variabel sudah menjelaskan atau memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti atau dengan kata lain instrument adalah reliabel atau terpercaya

## 2. Studi Dokumentasi

Dalam pengumpulan data juga dengan pengumpulan dokumen – dokumen yang ada diperusahaan tentang sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi serta data yang ada dilokasi penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuantitatif yakni, menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka- angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut, dengan rumus dibawah ini:

### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Juliandi (2015, hal. 153) “Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat akibat pengaruh dari variabel

bebas". Untuk mengetahui hubungan variabel Independent terhadap variabel dependent digunakan regresi linier berganda dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

(Juliandi, dkk, 2015 hal 157)

Keterangan:

$Y = \hat{Y}$  Pencairan Pajak

$\alpha = \hat{\alpha}$  Konstanta

$\beta = \hat{\beta}$  Koefisien regresi

$X_1 = \hat{X}_1$  Penagihan Pajak

$X_2 = \hat{X}_2$  Pemeriksaan Pajak

Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji lolos kendala linier atau uji asumsi klasik.

#### a. Uji Normalitas

Menurut Juliandi, dkk (2015, hal 160) Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat Apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Untuk mengetahui data berdistribusi normal digunakan uji statistic Kolmogorov-smirnov (K-S). dengan asumsi, bila nilai signifikan  $< 0.05$  berarti distribusi data tidak normal, sebaliknya bila nilai signifikan  $> 0.05$  berarti distribusi data normal. Uji Kolmogrov-smirnov, uji ini bertujuan supaya penelitian ini dapat mengetahui normal atau tidaknya antara variabel independen dengan variabel dependen ataupun keduanya, dapat ditunjukkan bahwa:

$H_0 = \hat{H}_0$  Data residual berdistribusi normal

$H_\alpha = \hat{H}_\alpha$  Data residual tidak berdistribusi normal

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Menurut Juliandi, dkk, (2015, hal. 161), Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen (bebas). Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/VIF*), yang tidak melebihi 4 atau 5. Pendeteksian terhadap Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat *Variance Inflating Factor/VIF* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Bila  $VIF > 5$  maka terdapat masalah Multikolinieritas yang serius.
- b) Bila  $VIF < 5$  maka tidak terdapat masalah Multikolinieritas yang serius.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Juliandi, dkk, (2015, hal. 161), Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homokedastisitas*, dan jika varians berbeda disebut *heterokedastisitas*. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar di bawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

## 2. Pengujian Hipotesis

### a. Uji t (Parsial)



Uji t digunakan untuk mengetahui Apakah secara parsial masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Rumus yang digunakan untuk uji t Sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sugiyono (2016, hal. 184)

Keterangan:

t = Nilai t hitung

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Tahap-tahap:

1) Bentuk pengujian

$H_0$  :  $rs = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas

(X) dengan variabel terikat (Y).

$H_a$  :  $rs \neq 0$ , artinya terdapat hubungan antara variabel bebas (X)

dengan variabel terikat (Y).

2) Kriteria pengambilan keputusan

$H_0$  diterima : jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$ ,  $df = n - 2$

$H_0$  ditolak : jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

$t_{hitung} \geq t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} \leq -t_{tabel}$

#### b. Uji F (Simultan)

Uji F ataupun uji signifikansi serentak digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas untuk dapat menjelaskan keragaman variabel tidak terikat, serta untuk mengetahui Apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol. Rumus uji F adalah Sebagai berikut:

$$Fh = \frac{r^2/k}{(1-r^2)(n-k-1)}$$

Sugiyono (2016, hal.240 )

Keterangan:

Fh = Nilai f hitung

$r^2$  = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel Independen

$n$  = Jumlah anggota sampel  
Tahap-tahap:

- 1) Bentuk pengujian  
Ho:  $r_s = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas (X)  
dengan variabel terikat (Y)  
Ho :  $r_s \neq 0$ , artinya terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan  
variabel terikat (Y)
  - 2) Kriteria Pengambilan Keputusan  
Ho diterima jika  $-f_{tabel} \leq f_{hitung} \leq f_{tabel}$  , untuk  $\alpha = 5\%$   
Ho ditolak jika  $f_{hitung} > f_{tabel}$  , atau  $-f_{hitung} < -f_{tabel}$  untuk  $\alpha = 5\%$
- 3. Uji Koefisien Determinasi (R-square)**

Nilai R-square dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R-square semakin mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinasi adalah Sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100$$

Sarwono (2017, hal. 17)

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi  
 $r^2$  = Nilai Korelasi Berganda  
100% = Persentase Kontribusi

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 10 pernyataan untuk variabel Penagihan Tunggakan Pajak (X1), 10 pernyataan untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X2) dan 6 pernyataan untuk variabel Pencairan Tunggakan Pajak (Y). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 99 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Binjai responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis.

#### 2. Identitas Responden

##### a. Jenis kelamin

**Tabel IV.1  
Jenis Kelamin  
Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	56	56,6	56,6	56,6
	Perempuan	43	43,4	43,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

**Sumber : SPSS 24.00**

Dari tabel IV-1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 56 (56,6%) orang laki-laki dan wanita sebanyak 43 (43,4%) orang. Bisa di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki-laki.

##### b. Usia

**Tabel IV.2  
Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dibawah 30 Tahun	15	15,2	15,2	15,2
	30-39 Tahun	38	38,4	38,4	53,5
	40-49 Tahun	33	33,3	33,3	86,9
	50 Tahun Ke Atas	13	13,1	13,1	100,0

Total	99	100,0	100,0
-------	----	-------	-------

**Sumber : SPSS 24.00**

Berdasarkan tabel IV.2 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 15 (15,2%) orang berusia dibawah 30 tahun, 38 (38,4%) orang berusia 30-39 tahun, 33 (33,3%) orang berusia 41-50 tahun dan 13 (13,1%) orang berusia 50 tahun ke atas. bisa di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah berusia antara 30-39 tahun.

### 3. Persentase Jawaban Responden

**Tabel IV.3 Kriteria Jawaban Responden**

Kriteria	Keterangan
SS	Sangat Setuju
S	Setuju
KS	Kurang Setuju
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

Dibawah ini akan dilampirkan persentase jawaban dari setiap pernyataan yg telah disebarakan kepada responden.

**Tabel IV.4  
Persentase Jawaban Responden Variabel Pencairan Tunggakan Pajak (Y)**

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan negara.	41,4 %	55,6%	3%		
2.	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan negara.	50,5 %	45,5%	4%		
3.	Pajak yang saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.	49,5 %	48,5%	2%		
4	Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar.	46,5 %	51,5%	1%	1%	
5	Perlunya berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat.	50,5 %	44,4%	4%	1%	

6	Kerjasama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.	38,4 %	57,6%	4%		
---	---	--------	-------	----	--	--

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel pencairan tunggakan pajak dimana mayoritas jawaban dari responden setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Binjai.

**Tabel IV.5**  
**Persentase Jawaban Responden Variabel Penagihan Tunggakan Pajak (X1)**

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak.	39,4%	57,6%	3%		
2	Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak harus dilakukan penagihan.	46,5%	49,5%	2%	2%	
3	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada Surat Ketetapan Pajak.	44,4%	53,5%	2%		
4	Saya tidak pernah mendapat Surat Tagihan Pajak.	50,5%	46,5%	3%		

5	Surat Paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.	50,5%	47,5%	2%		
6	Surat Teguran diterbitkan apabila Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak.	46,5%	51,5%	1%	1%	
7	Saya merasa malu apabila mendapatkan Surat Teguran karena tidak membayar pajak.	49,5%	45,5%	4%	1%	
8	Penyitaan barang milik Wajib Pajak dilakukan apabila Wajib Pajak tidak cukup untuk melunasi utang pajaknya	45,5%	51,5%	3%		
9	Pencabutan sita dilakukan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajaknya.	47,5%	47,5%	3%	2%	
10	Pelelangan barang milik Wajib Pajak harus diberitahukan kepada Wajib Pajak	45,5%	52,5%	2%		

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel penagihan tunggakan pajak dimana mayoritas jawaban dari responden setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Binjai.

**Tabel IV.6**  
**Persentase Jawaban Responden Variabel Pemeriksaan Pajak (X2)**

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.	48,5%	47,5%	2%	2%	
2	Saya takut terkena pemeriksaan apabila saya melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak.	39,4%	57,6%	3%		
3	Saya takut terkena pemeriksaan apabila saya tidak membayar pajak.	51,5%	44,4%	4%		
4	Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak.	47,5%	48,5%	3%	1%	

5	Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila adanya dugaan tindakan pidana dibidang perpajakan.	45,5%	52,5%	1%	1%	
6	Pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan bagi Wajib Pajak yang diperiksa.	51,5%	43,4%	4%	1%	
7	Saya menyampaikan SPT Tahunan dengan benar.	42,4%	53,5%	4%		
8	Pemeriksaan mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan jujur.	48,5%	49,5%	2%		
9	Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan Wajib Pajak.	38,4%	53,5%	7%	1%	
10	Wajib Pajak yang diperiksa dapat mengajukan keberatan.	40,4%	50,5%	8,1%	1%	

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel pemeriksaan pajak dimana mayoritas jawaban dari responden setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Binjai.

#### 4. Model Regresi

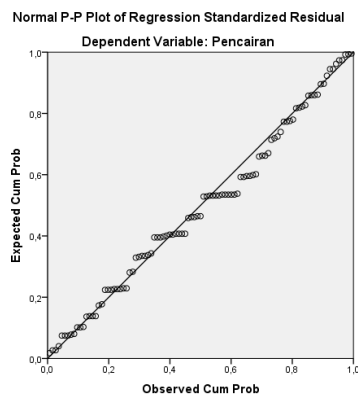
##### a. uji asumsi klasik

Dalam regresi linier berganda yang dikenal dengan beberapa asumsi klasik regresi berganda atau dikenal dengan BLUE (*Best Linear Unbias Estimation*).Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model regresi merupakan model yang baik atau tidak.Ada beberapa pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model regresi merupakan yang baik atau tidak. Ada beberapa pengujian asumsi klasik tersebut yakni :

- 1) Normalitas
  - 2) Multikolinearitas
  - 3) Heterokedastistas
- 1) Normalitas**

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variable dependent dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar IV.1**  
**Hasil Uji Normalitas**



**Sumber : SPSS 24.00**

Berdasarkan gambar IV.1 di atas dapat dilihat bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal artinya data antara variabel dependen dan variabel independennya memiliki hubungan atau distribusi yang normal atau memenuhi uji asumsi normalitas.

## 2) Multikolieneritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantaranya variabel bebas, dengan ketentuan :

- a) Bila *Tolerance* < 0,1 atau sama dengan  $VIF > 5$  maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius.
- b) Bila *Tolerance* > 0,1 atau sama dengan  $VIF < 5$  maka tidak terdapat masalah multikolinearitas.



Dengan SPSS versi 24.00 maka dapat diperoleh hasil uji multikolinearitas sebagai berikut :

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error				Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1,193	1,353		,881	,380		
	Penegihan	,144	,053	,235	2,709	,008	,294	3,407
	Pemeriksaan	,431	,055	,680	7,833	,000	,294	3,407

a. Dependent Variable: Pencairan

**Sumber : SPSS 24.00**

Berdasarkan tabel IV.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai *VarianceInflation Factor* (VIF) untuk variabel penagihan tunggakan pajak ( $X_1$ ) sebesar 3,407 dan variabel pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) sebesar 3,407. Dari masing-masing variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai 5. Demikian juga nilai *Tolerance* pada variabel penagihan tunggakan pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,294 dan variabel pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,294. Dari masing-masing variabel nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen yang di indikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 5.

### 3) Uji Heterokedastisitas

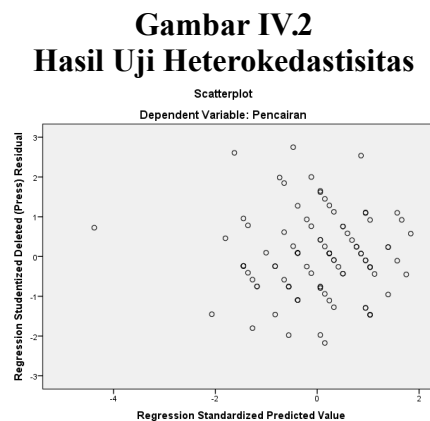
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan metode informal. Metode informal dalam

pengujian heterokedastisitas yakni metode grafik dan metode *Scatterplot*.

Dasar analisis yaitu sebagai berikut :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola yang teratur maka telah terjadi heterokedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar tidak teratur, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Dengan SPSS versi 24.00 maka dapat diperoleh hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut :



**Sumber : SPSS 22.00**

Bentuk gambar IV.2 diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

#### **b. Regresi Linier Berganda**

Model regresi linier berganda yang digunakan adalah pencairan tunggakan pajak sebagai variabel dependen dan enagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen. Dimana analisis berganda berguna untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing

variabel dependen terhadap variabel independen. Berikut hasil pengelolaan data dengan menggunakan SPSS versi 24.00.

**Tabel IV.8**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1,193	1,353		,881	,380
	Penagihan	,144	,053	,235	2,709	,008
	Pemeriksaan	,431	,055	,680	7,833	,000

a. Dependent Variable: Pencairan

**Sumber : SPSS 24.00**

Dari tabel IV.8 diatas diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

- 1) Konstanta = 1,193
- 2) Penagihan Tunggakan Pajak = 0,144
- 3) Pemeriksaan Pajak = 0,431

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda

sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = 1,193 + 0,144_1 + 0,431_2$$

Keterangan :

- 1) Konstanta sebesar 1,193 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap konstan maka pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kota Binjai akan meningkat.
- 2)  $\beta_1$  sebesar 0,144 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila penagihan tunggakan pajak mengalami ditingkatkan maka akan diikuti oleh peningkatan pencairan tunggakan pajak sebesar 0,144 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- 3)  $\beta_2$  sebesar 0,431 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila pemeriksaan pajak ditingkatkan maka akan diikuti oleh peningkatan pencairan tunggakan pajak sebesar 0,431 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

### c. Pengujian Hipotesis

#### 1) Uji t Statistik atau Uji Parsial

Untuk t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam

$$t = r \frac{n-2}{1-r^2}$$

mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas (X1) secara individual terdapat hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dimana :

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi

n = banyaknya pasangan rank

Bentuk pengujian :

- a)  $H_0 : r_s = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).
- b)  $H_a : r_s \neq 0$ , artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut :

- a)  $H_0$  diterima apabila  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$ . Df = n - 2
- b)  $H_0$  ditolak apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan SPSS versi 24.00 maka diperoleh hasil uji statistik t sebagai berikut:

**Tabel IV.9**  
**Hasil Uji Statistik t (parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1,193	1,353		,881	,380
	Penegihan	,144	,053	,235	2,709	,008
	Pemeriksaan	,431	,055	,680	7,833	,000

a. Dependent Variable: Pencairan

**Sumber : SPSS 24.00**

Hasil pengujian statistik 1 pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pengaruh Penagihan Tunggalan Pajak (X1) Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak (Y)**

Bedasarkan tabel IV.9 diatas diperoleh t hitung untuk variable penagihan tunggakan pajak sebesar 2,709 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan  $dk = n-2$  ( $99-2=97$ ), di peroleh t tabel 1,984. Jika t hitung  $>$  t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, demikian juga sebaliknya jika t hitung  $<$  t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, didalam hal ini t-hitung = 2,709  $>$  t-tabel =1,984. Ini berarti terdapat pengaruh antara penagihan tunggakan pajak dengan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas t yakni sig adalah 0,008 sedang taraf signifikan  $\alpha$  yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig  $0,008 \leq 0,05$ , sehingga  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara penagihan tunggakan pajak dengan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai.

**b) Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y)**

Bedasarkan tabel IV.9 diatas diperoleh t hitung untuk variable pemeriksaan pajak sebesar 7,833 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan  $dk = n-2$  ( $99-2=97$ ), di peroleh t tabel 1,984. Jika t hitung  $>$  t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, demikian juga sebaliknya jika t hitung  $<$  t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, didalam hal ini t-hitung = 7,833  $>$  t-tabel =1,984. Ini berarti terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas t yakni sig adalah 0,000 sedang taraf signifikan  $\alpha$  yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka

nilai sig  $0,008 \leq 0,05$ , sehingga  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai

## 2) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F atau juga disebut uji signifikan serentak dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak untuk dapat atau menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat yaitu pencairan tunggakan pajak. Uji F juga dimaksud untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 24.00, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel IV.10**  
**Hasil Uji Simultan (Uji-F)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	257,112	2	128,556	177,746	,000 <sup>b</sup>
	Residual	69,433	96	,723		
	Total	326,545	98			

a. Dependent Variable: Pencairan

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan, Penegihan

**Sumber : SPSS 24.00**

Dari tabel IV.10 diatas bisa dilihat bahwa nilai f adalah 177,746,

kemudian nilai sig nya adalah 0,000

$H_0: \beta = 0$ , artinya penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP kota Binjai.

$H_0: \beta \neq 0$ , artinya penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP kota Binjai

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah :

- 1) Jika  $f_{hitung} < f_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP kota Binjai
- 2) Jika  $f_{hitung} > f_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP kota Binjai

Bedasarkan tabel IV-10 diatas diperoleh  $f_{hitung}$  penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak sebesar 177,746 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan  $dk = n-2-1$  ( $99-2-1=96$ ), di peroleh  $f_{tabel}$  3,09. Jika  $f_{hitung} > f_{tabel}$  maka didapat pengaruh yang signifikan antara  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$ , demikian juga sebaliknya jika  $f_{hitung} < f_{tabel}$  maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$ , didalam hal ini  $f_{hitung} = 177,746 > f_{tabel} = 3,09$ . Ini berarti pengaruh positif antara penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas  $f$  yakni sig adalah 0,000 sedang taraf signifikan  $\alpha$  yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,000  $<$  0,05, sehingga  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima Ini berarti pengaruh positif dan signifikan antara penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

##### **5. Koefisien Determinasi (R-Square)**

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana

kontribusi atau persentase penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

**Tabel IV.11**  
**Hasil Uji Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,887 <sup>a</sup>	,787	,783	,85045

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan, Penegihan

b. Dependent Variable: Pencairan

**Sumber : SPSS 24.00**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0,887 atau 88,7% yang berarti bahwa hubungan antara pencairan tunggakan pajak ndengan variabel bebasnya, yaitu penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak adalah erat. Pada nilai *R-Square* dalam penelitian ini sebesar 0,787 yang berarti 78,7% variasi dari pencairan tunggakan pajak dijelaskan oleh variabel bebas yaitu penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak. Sedangkan sisanya 21,3% dijelaskan oleh varibel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai *R-Square* ( $R^2$ ) atau koefisien determinasi dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,783 yang berarti 78,3% pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai dapat dijelaskan oleh penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak. Sedangkan 21,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kemudian *standard error of the estimated* artinya mengukur variabel dari nilai yang diprediksi. *Standard error of the estimated* disebut juga standar diviasi. *Standard error of the estimated* dalam penelitian ini adalah sebesar 0,85045 dimana semakin kecil standar deviasi berarti model semakin baik dalam memprediksi pencairan tunggakan pajak.



## **B. Pembahasan**

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada tiga (3) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

### **1. Pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan**

#### **Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara penagihan tunggakan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak  $t_{hitung}$  sebesar 2,709 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,008 \leq 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan penagihan tunggakan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai.

Semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak dan semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak yang membayar tunggakan pajak setelah surat penagihan pajak diterbitkan maka, akan berimbang pada meningkatnya penerimaan pajak. Semakin besar pelaksanaan penagihan tunggakan pajak aktif maka pencairan tunggakan pajak akan tinggi. Oleh karena itu, untuk setiap kenaikan penagihan tunggakan pajak sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai. Pelaksanaan penagihan tunggakan pajak memiliki hubungan yang cukup kuat/tinggi dengan pencairan tunggakan pajak.

Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat pakasa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdayani (2017) menyimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

## **2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak  $t_{hitung}$  sebesar 7,833 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai.

Pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan Wajib Pajak dalam menjalankan *asas self assessment*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi intensitas intensifikasi pajak melalui pemeriksaan pajak, maka kepatuhan pajak dalam menjalankan *asas self assessment* akan tercapai dan penerimaan pajak pun semakin meningkat. Semakin efektivitas pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula pencairan tunggakan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah mempelajari berkas WP/berkas data dan menganalisis SPT serta Laporan Keuangan Wajib Pajak lalu mengidentifikasi masalah nya dan melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak kemudian baru menentukan ruang lingkup pemeriksaan maka pemeriksa pun akan mendapatkan gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanto (2012) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

### **3. Pengaruh Penagihan Tunggalan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Secara Bersama Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara penagihan tunggalan pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama terhadap pencairan tunggalan pajak  $F_{hitung}$  sebesar 177,746 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 3,09 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh signifikan penagihan tunggalan pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama terhadap pencairan tunggalan pajak pada KPP Pratama kota Binjai.

Semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak dan semakin meningkatnya pemeriksaan pajak maka akan berimbas pada meningkatnya pencairan tunggalan pajak. Semakin besar pelaksanaan penagihan tunggalan pajak dan pemeriksaan pajak maka pencairan tunggalan pajak akan tinggi.

Tunggalan pajak pada KPP Pratama kota Binjai dapat ditagih melalui penagihan pasif dan penagihan aktif dengan target pencairan utang pajak yang telah ditetapkan. Penagihan pajak aktif merupakan lanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Dengan membandingkan realisasi penagihan aktif

dengan target pencairan utang pajak maka akan diketahui efektivitas penagihan aktif.

Wajib pajak melaporkan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak, SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tersebut diperiksa oleh AR (*Account Representative*) untuk membuktikan kebenaran dari SPT yang telah dilaporkan, dengan terdapatnya masalah pada SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka KPP Pratama Binjai menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) kepada pihak pemeriksaan. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) terbit, maka dilakukannya pemeriksaan oleh pihak pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak berupa meminjam laporan keuangan, buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak dan keterangan lainnya untuk membuktikan kebenaran dari SPT tahunan yang dilaporkan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mohammad (2017) menyimpulkan bahwa secara simultan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Penagihan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial ada pengaruh signifikan penagihan tunggakan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai dengan diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,709 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,008 \leq 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Secara parsial ada pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai dengan diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 7,833 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,008 \leq 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
3. Secara simultan ada pengaruh signifikan penagihan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama kota Binjai dengan  $F_{hitung}$  sebesar 177,746 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 3,09 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Petugas pajak perlu memperhatikan kinerja dalam melakukan pemeriksaan dan penagihan, karena apabila terdapat pemeriksaan yang bermasalah, biasanya akan menimbulkan permasalahan pula dalam penagihannya.
2. Dalam upaya penagihan pajak, sangat penting fiskus lebih mengedepankan fungsi pembinaan, agar wajib pajak yang menunggak pajaknya lebih patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajibannya.
3. Untuk mengurangi tunggakan pajak petugas pajak hendaknya meningkatkan pemeriksaan setiap saatnya.
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika Safitri (2016). "Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah". Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bambang Irawan dan Teguh Budiono (2015). "Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan". Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol.7 No.02, September 2015.
- Diaz Priantara (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Eddy Faisal (2016). *Memahami Amnesti Pajak Dengan Cerdas & Lengkap*. Jakarta: Buku Pintar Indonesia.
- Erly Suandy (2011). *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Hasbi Rifqiansyah (2014), *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Pada KPP Pratama Malang Utara*, Skripsi S1, Universitas Brawijaya Malang.
- Juliandi, Azuar, Irfan dan Manurung, Saprihal, (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Medan: UMSU PRESS
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007. "Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak".
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2007. "Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak".
- Keputusan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 4 Ayat (2) . "Tentang Kriteria Pemeriksaan Pajak".
- M, Bastari (2015). *Perpajakan Teori dan kasus*. Medan: Perdana Publishing
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Nova Mardelina Nasution (2015), *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur*. Skripsi S1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Pandu Wicaksono dan Wirawan B.Ilyas (2015). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar (2014). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Said Salim (2015) “Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur“. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Siti Resmi (2011). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo (2011). Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.



## Notes

Output Created		22-FEB-2019 06:59:05
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	99
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax	<pre> REGRESSION   /DESCRIPTIVES MEAN   STDDEV CORR SIG N   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS   CI(95) R ANOVA COLLIN TOL   CHANGE ZPP   /CRITERIA=PIN(.05)   POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT Y   /METHOD=ENTER X1 X2   /SCATTERPLOT=(*SDRESID   ,*ZPRED)   /RESIDUALS DURBIN   HISTOGRAM(ZRESID)   NORMPROB(ZRESID)   /CASEWISE PLOT(ZRESID)   OUTLIERS(3).           </pre>	
Resources	Processor Time	00:00:00,84
	Elapsed Time	00:00:00,69
	Memory Required	1644 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	904 bytes

## Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pencairan	26,5455	1,82540	99
Penegihan	44,2828	2,98308	99
Pemeriksaan	44,0101	2,88025	99

## Correlations

		Pencairan	Penegihan	Pemeriksaan
Pearson Correlation	Pencairan	1,000	,807	,878
	Penegihan	,807	1,000	,841
	Pemeriksaan	,878	,841	1,000
Sig. (1-tailed)	Pencairan	.	,000	,000

	Penegihan	,000	.	,000
	Pemeriksaan	,000	,000	.
N	Pencairan	99	99	99
	Penegihan	99	99	99
	Pemeriksaan	99	99	99

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemeriksaan, Penegihan <sup>b</sup>	.	Enter

- a. Dependent Variable: Pencairan  
b. All requested variables entered.

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	,887 <sup>a</sup>	,787	,783	,85045	,787	177,746	2	96	,000	2,097

- a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan, Penegihan  
b. Dependent Variable: Pencairan

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,887 <sup>a</sup>	,787	,783	,85045

- a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan, Penegihan  
b. Dependent Variable: Pencairan

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	257,112	2	128,556	177,746	,000 <sup>b</sup>
	Residual	69,433	96	,723		
	Total	326,545	98			

- a. Dependent Variable: Pencairan  
b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan, Penegihan

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1,193	1,353		,881	,380	-1,493	3,879						
	Penegihan	,144	,053	,235	2,709	,008	,038	,249	,807	,266	,127	,294	3,407	
	Pemeriksaan	,431	,055	,680	7,833	,000	,322	,540	,878	,624	,369	,294	3,407	

- a. Dependent Variable: Pencairan

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,193	1,353		,881	,380		
	Penegihan	,144	,053	,235	2,709	,008	,294	3,407
	Pemeriksaan	,431	,055	,680	7,833	,000	,294	3,407

a. Dependent Variable: Pencairan

### Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

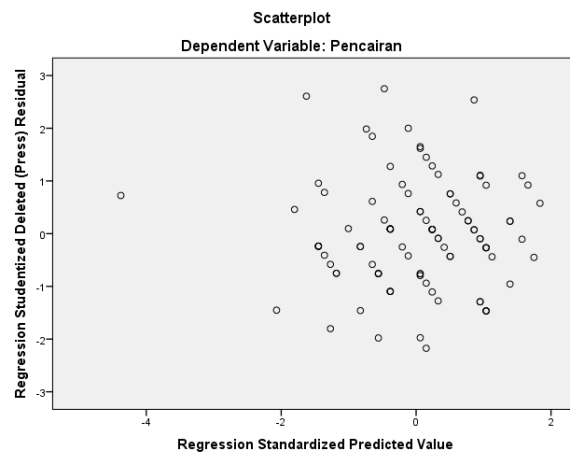
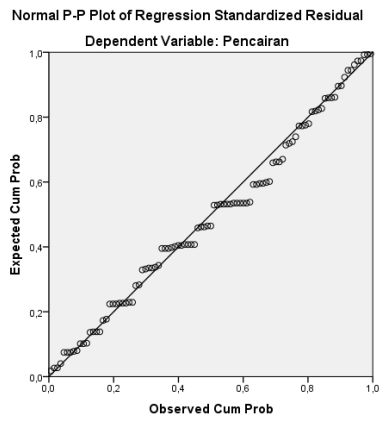
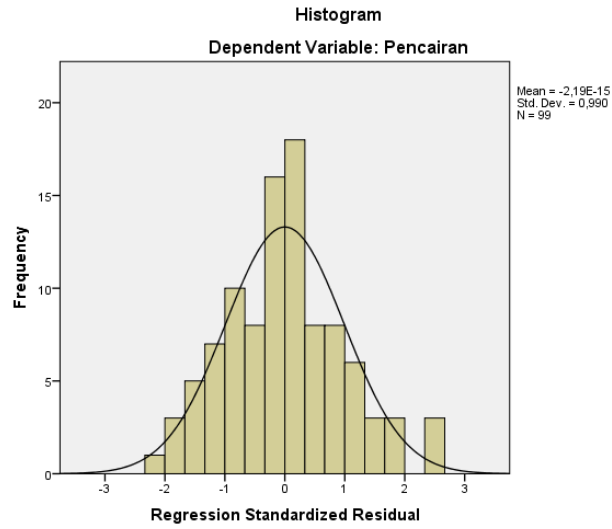
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions		
					Penegihan	Pemeriksaan	
1	1	2,997	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,003	33,489	,99	,09	,07	,07
	3	,001	65,796	,01	,91	,93	,93

a. Dependent Variable: Pencairan

### Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19,4543	29,5202	26,5455	1,61975	99
Std. Predicted Value	-4,378	1,837	,000	1,000	99
Standard Error of Predicted Value	,091	,398	,141	,045	99
Adjusted Predicted Value	19,3015	29,4960	26,5409	1,62594	99
Residual	-1,78759	2,21803	,00000	,84172	99
Std. Residual	-2,102	2,608	,000	,990	99
Stud. Residual	-2,133	2,660	,003	1,007	99
Deleted Residual	-1,84149	2,30766	,00454	,87092	99
Stud. Deleted Residual	-2,174	2,750	,005	1,018	99
Mahal. Distance	,126	20,449	1,980	2,426	99
Cook's Distance	,000	,137	,012	,021	99
Centered Leverage Value	,001	,209	,020	,025	99

a. Dependent Variable: Pencairan





	Sig. (2-tailed)	,002	,001	,041	,649	,000	,850		,049	,008	,002	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X8	Pearson Correlation	,668**	-,057	,075	,133	,259**	,184	,199*	1	,029	-,008	,463**
	Sig. (2-tailed)	,000	,577	,462	,188	,010	,068	,049		,776	,935	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X9	Pearson Correlation	-,073	,682**	,234*	,084	,335**	,017	,265**	,029	1	,222*	,574**
	Sig. (2-tailed)	,472	,000	,020	,408	,001	,867	,008	,776		,028	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X10	Pearson Correlation	,152	,257*	,593**	,122	,251*	,242*	,313**	-,008	,222*	1	,597**
	Sig. (2-tailed)	,132	,010	,000	,230	,012	,016	,002	,935	,028		,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Penagihan	Pearson Correlation	,478**	,578**	,492**	,396**	,584**	,386**	,606**	,463**	,574**	,597**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### RELIABILITY

```

/VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

## Reliability

### Notes

Output Created	22-FEB-2019 07:01:36	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	99
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.	
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,00

## Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,694	10

#### CORRELATIONS

```

/VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 JLM
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
  
```

## Correlations

### Notes

Output Created	22-FEB-2019 07:02:19	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	99
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax	CORRELATIONS /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 JLM /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00,08
	Elapsed Time	00:00:00,07

### Correlations

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	Pemeriksaan
X1	Pearson Correlation	1	,197	,057	,162	-,023	,277**	,137	,221*	-,057	,127	,446**
	Sig. (2-tailed)		,050	,576	,109	,823	,005	,175	,028	,575	,210	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X2	Pearson Correlation	,197	1	,095	,115	,024	,259**	,039	,114	,101	,173	,428**
	Sig. (2-tailed)			,576	,109	,823	,005	,175	,028	,575	,210	,000

	Sig. (2-tailed)	,050		,351	,256	,815	,010	,700	,262	,320	,087	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X3	Pearson Correlation	,057	,095	1	,002	,249*	,018	,124	,071	-,021	,314**	,390**
	Sig. (2-tailed)	,576	,351		,986	,013	,860	,223	,487	,836	,002	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X4	Pearson Correlation	,162	,115	,002	1	,181	,346**	,085	,512**	,044	,311**	,575**
	Sig. (2-tailed)	,109	,256	,986		,073	,000	,401	,000	,663	,002	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X5	Pearson Correlation	-,023	,024	,249*	,181	1	,026	,248*	-,017	-,008	,088	,356**
	Sig. (2-tailed)	,823	,815	,013	,073		,800	,013	,868	,934	,386	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X6	Pearson Correlation	,277**	,259**	,018	,346**	,026	1	,136	,334**	,021	,255*	,562**
	Sig. (2-tailed)	,005	,010	,860	,000	,800		,180	,001	,839	,011	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X7	Pearson Correlation	,137	,039	,124	,085	,248*	,136	1	,178	,417**	,068	,498**
	Sig. (2-tailed)	,175	,700	,223	,401	,013	,180		,078	,000	,506	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X8	Pearson Correlation	,221*	,114	,071	,512**	-,017	,334**	,178	1	,045	,515**	,613**
	Sig. (2-tailed)	,028	,262	,487	,000	,868	,001	,078		,660	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X9	Pearson Correlation	-,057	,101	-,021	,044	-,008	,021	,417**	,045	1	,029	,335**
	Sig. (2-tailed)	,575	,320	,836	,663	,934	,839	,000	,660		,775	,001
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X10	Pearson Correlation	,127	,173	,314**	,311**	,088	,255*	,068	,515**	,029	1	,609**
	Sig. (2-tailed)	,210	,087	,002	,002	,386	,011	,506	,000	,775		,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Pemeriksaan	Pearson Correlation	,446**	,428**	,390**	,575**	,356**	,562**	,498**	,613**	,335**	,609**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### RELIABILITY

```

/VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

## Reliability



## Notes

Output Created		22-FEB-2019 07:02:32
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	99
Matrix Input		
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.	
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,01

## Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,630	10

```

NEW FILE.
DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT.
CORRELATIONS
/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 J1m
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
  
```

## Correlations

### Notes

Output Created		22-FEB-2019 07:03:46
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet2

	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	99
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Jlm /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,06
	Elapsed Time	00:00:00,07

[DataSet2]

## Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Pencairan
Y1	Pearson Correlation	1	,076	,067	,081	,152	,199*	,482**
	Sig. (2-tailed)		,457	,507	,426	,133	,048	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
Y2	Pearson Correlation	,076	1	-,060	,278**	,100	,102	,474**
	Sig. (2-tailed)	,457		,555	,005	,323	,316	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
Y3	Pearson Correlation	,067	-,060	1	,085	,485**	,063	,510**
	Sig. (2-tailed)	,507	,555		,403	,000	,535	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
Y4	Pearson Correlation	,081	,278**	,085	1	,054	,295**	,560**
	Sig. (2-tailed)	,426	,005	,403		,598	,003	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
Y5	Pearson Correlation	,152	,100	,485**	,054	1	,114	,616**
	Sig. (2-tailed)	,133	,323	,000	,598		,262	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
Y6	Pearson Correlation	,199*	,102	,063	,295**	,114	1	,547**
	Sig. (2-tailed)	,048	,316	,535	,003	,262		,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
Pencairan	Pearson Correlation	,482**	,474**	,510**	,560**	,616**	,547**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99	99	99

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

```
RELIABILITY
/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
```

## Reliability

<b>Notes</b>		
Output Created		22-FEB-2019 07:04:01
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet2
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	99
Missing Value Handling	Matrix Input	
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,01

## Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,695	6

```
NEW FILE.
DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT.
```

FREQUENCIES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10  
 /ORDER=ANALYSIS.

## Frequencies

		Notes	
Output Created			22-FEB-2019 07:06:59
Comments			
Input	Active Dataset		DataSet3
	Filter		<none>
	Weight		<none>
	Split File		<none>
	N of Rows in Working Data File		99
Missing Value Handling	Definition of Missing		User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used		Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax			FREQUENCIES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time		00:00:00,03
	Elapsed Time		00:00:00,03

[DataSet3]

## Statistics

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
N	Valid	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Frequency Table

		X1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	3	3,0	3,0	3,0
	Setuju	57	57,6	57,6	60,6
	Sangat Setuju	39	39,4	39,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

X2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2,0	2,0	2,0
	Kurang Setuju	2	2,0	2,0	4,0
	Setuju	49	49,5	49,5	53,5
	Sangat Setuju	46	46,5	46,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### X3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	2	2,0	2,0	2,0
	Setuju	53	53,5	53,5	55,6
	Sangat Setuju	44	44,4	44,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### X4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	3	3,0	3,0	3,0
	Setuju	46	46,5	46,5	49,5
	Sangat Setuju	50	50,5	50,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### X5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	2	2,0	2,0	2,0
	Setuju	47	47,5	47,5	49,5
	Sangat Setuju	50	50,5	50,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### X6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Kurang Setuju	1	1,0	1,0	2,0
	Setuju	51	51,5	51,5	53,5
	Sangat Setuju	46	46,5	46,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### X7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Kurang Setuju	4	4,0	4,0	5,1
	Setuju	45	45,5	45,5	50,5
	Sangat Setuju	49	49,5	49,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### X8



## Frequency Table

### X1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2,0	2,0	2,0
	Kurang Setuju	2	2,0	2,0	4,0
	Setuju	47	47,5	47,5	51,5
	Sangat Setuju	48	48,5	48,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### X2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	3	3,0	3,0	3,0
	Setuju	57	57,6	57,6	60,6
	Sangat Setuju	39	39,4	39,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### X3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	4,0	4,0	4,0
	Setuju	44	44,4	44,4	48,5
	Sangat Setuju	51	51,5	51,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### X4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Kurang Setuju	3	3,0	3,0	4,0
	Setuju	48	48,5	48,5	52,5
	Sangat Setuju	47	47,5	47,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### X5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Kurang Setuju	1	1,0	1,0	2,0
	Setuju	52	52,5	52,5	54,5
	Sangat Setuju	45	45,5	45,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### X6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Kurang Setuju	4	4,0	4,0	5,1
	Setuju	43	43,4	43,4	48,5
	Sangat Setuju	51	51,5	51,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

**X7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	4,0	4,0	4,0
	Setuju	53	53,5	53,5	57,6
	Sangat Setuju	42	42,4	42,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

**X8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	2	2,0	2,0	2,0
	Setuju	49	49,5	49,5	51,5
	Sangat Setuju	48	48,5	48,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

**X9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Kurang Setuju	7	7,1	7,1	8,1
	Setuju	53	53,5	53,5	61,6
	Sangat Setuju	38	38,4	38,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

**X10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Kurang Setuju	8	8,1	8,1	9,1
	Setuju	50	50,5	50,5	59,6
	Sangat Setuju	40	40,4	40,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

NEW FILE.

DATASET NAME DataSet4 WINDOW=FRONT.

FREQUENCIES VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

/ORDER=ANALYSIS.

**Frequencies****Notes**

Output Created	22-FEB-2019 07:09:34	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet4
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	99
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.



Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,01

[DataSet4]

### Statistics

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
N	Valid	99	99	99	99	99	99
	Missing	0	0	0	0	0	0

### Frequency Table

#### Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	3	3,0	3,0	3,0
	Setuju	55	55,6	55,6	58,6
	Sangat Setuju	41	41,4	41,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

#### Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	4,0	4,0	4,0
	Setuju	45	45,5	45,5	49,5
	Sangat Setuju	50	50,5	50,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

#### Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	2	2,0	2,0	2,0
	Setuju	48	48,5	48,5	50,5
	Sangat Setuju	49	49,5	49,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

#### Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Kurang Setuju	1	1,0	1,0	2,0
	Setuju	51	51,5	51,5	53,5
	Sangat Setuju	46	46,5	46,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Kurang Setuju	4	4,0	4,0	5,1
	Setuju	44	44,4	44,4	49,5
	Sangat Setuju	50	50,5	50,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	4,0	4,0	4,0
	Setuju	57	57,6	57,6	61,6
	Sangat Setuju	38	38,4	38,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

```
NEW FILE.  
DATASET NAME DataSet5 WINDOW=FRONT.  
FREQUENCIES VARIABLES=JK US  
  /ORDER=ANALYSIS.
```

## Frequencies

### Notes

Output Created	22-FEB-2019 07:23:58	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet5
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	99
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax	FREQUENCIES VARIABLES=JK US /ORDER=ANALYSIS.	
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,01

[DataSet5]

### Statistics

		Jenis Kelamin	Usia
N	Valid	99	99
	Missing	0	0

## Frequency Table

### Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	56	56,6	56,6	56,6
	Perempuan	43	43,4	43,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

### Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dibawah 30 Tahun	15	15,2	15,2	15,2
	30-39 Tahun	38	38,4	38,4	53,5
	40-49 Tahun	33	33,3	33,3	86,9
	50 Tahun Ke Atas	13	13,1	13,1	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

no	X1										jumlah
1	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	44
2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	42
4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
5	4	5	4	3	5	4	5	4	5	4	43
6	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	45
7	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	47
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	46
10	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	44
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	45
13	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	47
14	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	43
15	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	43
16	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	43
17	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	45
18	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	44
19	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	43
20	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	43
21	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	47
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
23	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	46
24	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	46
25	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	47
26	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	48
27	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	45

28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	43
30	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
31	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	45
32	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	42
33	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	43
34	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	45
35	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	47
36	5	5	4	5	4	5	3	5	5	4	45
37	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	44
38	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	43
39	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
40	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	48
41	4	2	4	5	4	5	4	4	2	4	38
42	4	2	3	4	3	4	2	4	2	3	31
43	4	5	5	3	4	2	5	4	5	5	42
44	5	4	3	4	4	5	4	5	4	3	41
45	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	48
46	3	5	5	5	3	5	3	3	5	5	42
47	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	44
48	3	5	4	5	4	3	5	3	5	4	41
49	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	45
50	4	3	5	5	4	4	3	4	3	5	40
51	3	5	4	4	4	4	3	3	5	4	39
52	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	48
53	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
54	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
55	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	46
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
57	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	45
58	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	45
59	5	4	5	4	5	4	5	4	3	5	44
60	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	44
61	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	45
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
63	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	48
64	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	45
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
66	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	44
67	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	47
68	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	45
69	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
70	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	45
71	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	46
72	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	42

73	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	43
74	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	47
75	4	3	5	4	5	4	5	5	5	4	44
76	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	46
77	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	47
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
79	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	46
80	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	45
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
82	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	44
83	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	47
84	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	43
85	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
86	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	43
87	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	46
88	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	43
89	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	43
90	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	44
91	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	47
92	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
93	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
94	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	46
95	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	47
96	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	48
97	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	47
98	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
99	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	43

no	X2										jlm
1	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	47
2	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	42
3	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	43
4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	46
5	5	4	3	5	4	5	4	5	4	4	43
6	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	44
7	5	5	5	4	5	5	4	4	3	5	45
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	46
10	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	46
11	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41

12	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	43
13	5	4	5	5	4	5	5	5	2	4	44
14	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	44
15	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	43
16	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	45
17	4	4	5	4	5	5	5	4	3	3	42
18	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	45
19	4	5	4	5	4	4	4	5	5	3	43
20	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	44
21	5	5	4	5	5	5	4	5	3	4	45
22	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
23	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	47
24	4	5	5	4	5	4	5	4	4	3	43
25	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	47
26	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
27	4	4	4	5	5	5	5	5	4	3	44
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	43
30	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	46
31	5	4	5	4	5	5	4	4	5	3	44
32	5	4	4	4	4	4	4	4	5	2	40
33	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	45
34	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	46
35	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	47
36	5	4	5	4	5	3	5	4	5	4	44
37	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
38	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	43
39	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
40	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
41	2	4	5	4	5	4	4	4	4	4	40
42	2	3	4	3	4	2	4	3	4	3	32
43	5	5	3	4	2	5	4	4	4	4	40
44	4	3	4	4	5	4	5	4	5	4	42

45	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	48
46	5	5	5	3	5	3	3	3	3	3	38
47	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
48	5	4	5	4	3	5	3	4	3	4	40
49	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	47
50	3	5	5	4	4	3	4	4	4	4	40
51	5	4	4	4	4	3	3	4	3	4	38
52	3	5	5	4	4	4	4	5	4	5	43
53	5	5	5	5	5	5	3	5	3	5	46
54	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	47
55	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	47
56	4	3	5	4	5	4	5	4	5	4	43
57	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	45
58	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	45
59	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	42
60	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	46
61	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	45
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
63	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
64	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	47
65	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	43
66	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
67	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	44
68	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	43
69	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	45
70	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	44
71	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	47
72	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
73	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	43
74	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	47
75	5	4	3	4	5	5	5	4	4	3	42
76	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	47
77	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49

78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
79	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	44
80	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	44
81	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
82	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	42
83	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	47
84	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	42
85	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	42
86	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	43
87	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	45
88	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	43
89	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	43
90	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	45
91	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	47
92	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
93	5	4	5	2	4	5	5	5	4	5	44
94	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	47
95	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	47
96	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
97	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	44
98	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	40
99	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	45

no	Y						jlm
1	4	5	5	5	5	4	28
2	4	4	4	4	5	4	25
3	4	4	5	5	4	4	26
4	5	5	4	4	5	5	28
5	4	3	5	4	5	4	25
6	5	4	4	4	5	5	27
7	5	5	4	5	5	4	28
8	4	4	4	4	4	4	24
9	5	4	5	5	4	5	28
10	4	4	5	4	5	5	27
11	4	4	4	4	4	4	24



12	4	4	4	5	4	5	26
13	4	5	5	4	5	5	28
14	4	4	5	4	4	5	26
15	5	4	4	5	4	4	26
16	4	4	5	4	4	4	25
17	4	5	4	5	5	5	28
18	4	5	5	4	4	4	26
19	5	4	5	4	4	4	26
20	4	5	4	5	5	4	27
21	5	4	5	5	5	4	28
22	5	5	5	5	5	5	30
23	4	5	5	5	5	5	29
24	5	5	4	5	4	5	28
25	4	5	5	4	5	5	28
26	5	5	5	5	5	4	29
27	4	4	5	5	5	5	28
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	5	4	4	4	4	25
30	5	5	4	5	5	5	29
31	4	5	4	5	5	4	27
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	5	5	5	4	27
34	5	5	5	5	4	4	28
35	5	5	5	4	5	4	28
36	4	5	4	5	3	5	26
37	5	4	4	4	4	4	25
38	4	5	4	4	4	5	26
39	5	5	5	4	5	5	29
40	5	5	5	5	5	4	29
41	4	5	4	5	4	4	26
42	3	4	3	4	2	4	20
43	5	3	4	2	5	4	23
44	3	4	4	5	4	5	25
45	5	3	5	5	5	5	28
46	5	5	3	5	3	3	24
47	5	4	5	4	5	4	27
48	4	5	4	3	5	3	24
49	4	5	5	5	4	5	28
50	5	5	4	4	3	4	25
51	4	4	4	4	3	3	22
52	5	5	4	4	4	4	26
53	5	5	5	5	5	3	28
54	5	5	4	4	4	5	27
55	5	5	4	4	4	5	27
56	3	5	4	5	4	5	26

57	4	4	5	4	5	4	26
58	5	4	4	5	4	5	27
59	4	4	4	4	4	4	24
60	4	5	5	4	5	4	27
61	4	5	5	4	5	4	27
62	4	4	4	4	4	4	24
63	4	4	5	5	5	5	28
64	5	5	5	5	5	5	30
65	4	5	5	4	5	4	27
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	5	4	5	4	5	27
68	5	4	5	4	5	4	27
69	5	5	4	5	4	5	28
70	4	5	4	4	4	4	25
71	4	5	5	5	5	4	28
72	4	4	4	4	5	4	25
73	4	4	5	5	4	4	26
74	5	5	4	4	5	5	28
75	4	3	5	4	5	4	25
76	5	4	4	4	5	5	27
77	5	5	4	5	5	5	29
78	4	4	4	4	4	4	24
79	5	4	5	5	4	5	28
80	4	4	5	4	5	4	26
81	4	4	4	4	4	4	24
82	4	4	4	5	4	4	25
83	4	5	5	4	5	4	27
84	4	4	5	4	4	4	25
85	5	4	4	5	4	5	27
86	4	4	5	4	4	4	25
87	4	5	4	5	5	4	27
88	4	5	5	4	4	4	26
89	5	4	5	4	4	5	27
90	4	5	4	5	5	4	27
91	5	4	5	5	5	5	29
92	5	5	5	5	5	5	30
93	4	5	5	5	5	4	28
94	5	5	4	5	4	5	28
95	4	5	5	4	5	4	27
96	5	5	5	5	5	5	30
97	4	4	5	5	5	4	27
98	5	4	4	4	4	4	25
99	5	4	5	4	4	4	26

No	Jinis Kelamin	Usia
1	1	2
2	1	4
3	1	3
4	2	3
5	1	3
6	2	2
7	1	2
8	1	3
9	1	2
10	1	4
11	1	2
12	2	2
13	1	3
14	2	3
15	1	2
16	1	3
17	1	2
18	2	1
19	2	4
20	2	4
21	1	4
22	2	3
23	2	3
24	1	3
25	2	2
26	1	3
27	1	2
28	2	2
29	2	1
30	1	2
31	2	2
32	2	2
33	1	2
34	2	2
35	2	1
36	2	3
37	1	4

<b>38</b>	1	2
<b>39</b>	1	3
<b>40</b>	2	1
<b>41</b>	2	3
<b>42</b>	2	1
<b>43</b>	2	3
<b>44</b>	2	4
<b>45</b>	1	3
<b>46</b>	1	3
<b>47</b>	2	2
<b>48</b>	1	2
<b>49</b>	1	1
<b>50</b>	1	1
<b>51</b>	2	3
<b>52</b>	1	3
<b>53</b>	1	1
<b>54</b>	1	2
<b>55</b>	1	1
<b>56</b>	2	4
<b>57</b>	2	2
<b>58</b>	1	2
<b>59</b>	1	3
<b>60</b>	1	2
<b>61</b>	1	2
<b>62</b>	1	3
<b>63</b>	2	4
<b>64</b>	1	3
<b>65</b>	1	2
<b>66</b>	2	2
<b>67</b>	2	3
<b>68</b>	2	2
<b>69</b>	1	1
<b>70</b>	2	3
<b>71</b>	1	4
<b>72</b>	1	2
<b>73</b>	2	2
<b>74</b>	1	3
<b>75</b>	2	3
<b>76</b>	1	2
<b>77</b>	1	3
<b>78</b>	1	2

<b>79</b>	2	1
<b>80</b>	2	4
<b>81</b>	2	4
<b>82</b>	1	4
<b>83</b>	2	3
<b>84</b>	2	3
<b>85</b>	1	3
<b>86</b>	2	2
<b>87</b>	1	3
<b>88</b>	1	2
<b>89</b>	2	2
<b>90</b>	2	1
<b>91</b>	1	2
<b>92</b>	2	2
<b>93</b>	1	2
<b>94</b>	1	1
<b>95</b>	1	1
<b>96</b>	2	3
<b>97</b>	1	3
<b>98</b>	1	1
<b>99</b>	1	2

## INDRIANI SIAGIAN



### Data Pribadi

Tmp, Tgl Lahir : T. Balai 16 Mei 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Aek kanopan

### Kontak

Telepon HP : 082274356703  
Email : indrianisiagian16@gmail.com

# CURRICULUM VITAE

## Pendidikan

### FORMAL

#### Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

» Masuk Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
2015

» Lulus sebagai Sarjana Akuntansi  
2019

»

#### SMA NEGERI 1 KUALUH HULU

» Masuk  
2012

» Lulus  
2015

#### MTS ISLAMIYAH LONDO

» Masuk  
2009

» Lulus  
2012

#### SD NEGERI 132416

» Masuk  
2003

» Lulus  
2009

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 01 Februari 2019 menerangkan bahwa:

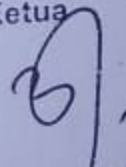
Nama : INDRIANI SIAGIAN  
N.P.M. : 1505170616  
Tempat / Tgl.Lahir : TANJUNG BALAI, 16 MEI 1992  
Alamat Rumah : JL.KARYA  
Judul Proposal : PENGARUH PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP  
PENCAIRAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
BINJAI

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Jumrin, SE, M.Si, 14/2/2019


Medan, 01 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

  
FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembimbing

  
JUMRIN, SE, M.Si

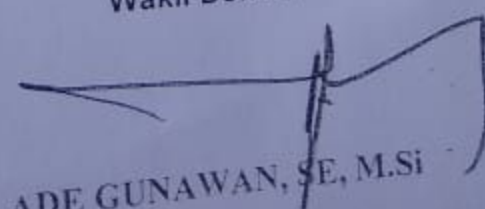
Sekretaris

  
ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembanding

  
SUKMA LESMANA, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 392/ TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**  
 Pada Tanggal : **07 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Indriani Saragih**  
 N P M : **1505170616**  
 Semester : **VII (Tujuh)**  
 Program Studi : **Akuntansi**  
 Judul Proposal / Skripsi : **Pengaruh Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencairan  
 Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

Dosen Pembimbing : **Jumirin., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 24 Januari 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 18 Jumadil Awwal 1440 H  
 24 Januari 2019 M

Dekan ✓  
  
**H. LAN RI, SE, MM, M.Si**

Wakil Rektori :  
 Wakil Rektor – II UMSU Medan.  
 Bertanggal.





BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Jum'at, 01 Februari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi yang diorganisir oleh :

Nama : INDRIANI SIAGIAN  
 N.P.M. : 1505170616  
 Tempat / Tgl.Lahir : TANJUNG BALAI, 16 MEI 1992  
 Alamat Rumah : JL.KARYA  
 Judul Proposal : PENGARUH PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENCAIRAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
	diempurnakan (deskrif)
	- l. kelalah masalah - dikurangi kean - kean - kerangka kerja
	kenaikan
	Memilih penulis →
Keputusan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang

Medan, 01 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua  
  
 FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris  
  
 ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing  
  
 JUNIR, SE, M.Si

Pembanding  
  
 SUKMA LESMANA, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

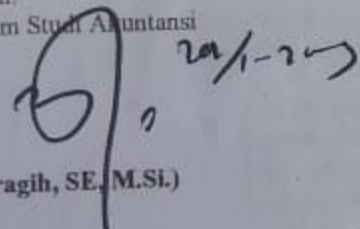
**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**


Nomor Agenda: 878/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/6/12/2018

Nama Mahasiswa : Indriani siagian  
 NPM : 1505170616  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Perpajakan  
 Tanggal Pengajuan Judul : 6/12/2018  
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor ..... atau;  
 Alternatif judul lainnya .....

Nama Dosen pembimbing :  
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing :  
*Jurnal. St. W.L. 2012, 2010*  
*pengaruh penanaman modal langsung terhadap*  
*perusahaan tunggakan pajak*  
 (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Medan, 11-12-2018

Disahkan oleh:  
 Ketua Program Studi Akuntansi  
  
 (Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing  
  
 (.....)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRIANI SIAGIAN  
NPM : 1505170616  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh penagihan dan pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama binjai

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP pratama binjai.


Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, maret 2019

Yang membuat pernyataan



  
INDRIANI SIAGIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : **INDRIANI SIAGIAN**  
 N.P.M : **1505170616**  
 Program Studi : **AKUNTANSI**  
 Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
 Judul Penelitian : **PENGARUH PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENCAIRAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
25-2-2019	Wawancara secara langsung Regulator perusahaan - - Di perusahaan bandung dengan Tomy. - Perbaikan keanggotaan persiapan laporan	<i>[Signature]</i>	
28-2-2019	Uraian Data perusahaan. - Perbaikan perusahaan - Perbaikan keanggotaan - Perbaikan laporan	<i>[Signature]</i>	
1-3-2019	Acc. sedang kejurusan	<i>[Signature]</i>	

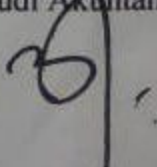
Medan, Februari 2019

Pembimbing Skripsi



**(JUMIRIN, S.E., M.Si)**

Diketahui/Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi



**(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)**



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..... H  
..... 20... M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I N D R I A N I S I A G I A N

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 6 1 6

Tempat.Tgl. Lahir : T A H J U N G B A L A I 1 6 M E I  
1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : A E K K A N O P A K

Tempat Penelitian : D J P S U M U T I K A N W I J  
M E D A N

Alamat Penelitian : D L S U K A M U L I A N O I F A  
M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Zula Hanum S.E.M.si)

Wassalam  
Pemohon

(Indriani Siagian)